

► TOL JAWA BARAT

MoU Pembebasan Lahan Direvisi

JAKARTA—Nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) mengenai pembebasan lahan tiga ruas di Jawa Barat direvisi, setelah pemerintah mengambil alih wewenang akibat rencana proyek tersebut yang tersendat.

Dimas Novita Sari
redaksi@bisnis.co.id

Ketiga tol tersebut yakni tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, tol Pasir Koja-Soreang, dan tol Bandung Intra Urban Toll Road.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengatakan pembebasan tanah di ketiga ruas tersebut tidak ada perkembangan.

BUMD Provinsi Jawa Barat sebelumnya menjanjikan pembebasan lahan selesai semua pada 2011, tetapi hingga akhir tahun lalu tidak ada perkembangan.

"Bahkan progresnya nol, jadi ya kita ambil alih," kata Djoko Murjanto, Jumat (22/2).

Padahal, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pembiayaan pembebasan tanah ketiga jalan tol tersebut.

Namun, karena MoU yang mengakomodasi keinginan BUMD provinsi untuk mengambil wewenang pembebasan lahan tersebut, pemerintah menarik kembali uang yang telah dianggarkan tersebut.

Setelah adanya revisi MoU tersebut, BUMD hanya akan bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi III, IV, V, dan VI.

Adapun untuk kedua jalan tol lainnya, pemerintah menghentikan proses pembebasan tanah yang juga merupakan daerah padat penduduk.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pengadaan Tanah I Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Jonggi Panangian mengatakan anggaran pembebasan tanah tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) seksi I dan II telah menyerap dana Rp254,89 miliar.

Dana tersebut berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp146,99 miliar dan tanah yang terbebaskan seluas 112,24 hektare.

Sedangkan tanah yang sudah dibebaskan dengan dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp107,9 miliar mencapai 89,44 hektare.

Dengan begitu, penggelontoran dana pembebasan lahan untuk

ruas tersebut baru mencapai Rp254,9 miliar atau 22,42% dari total kebutuhan biaya pengadaan lahan untuk jalan tol sepanjang 59,75, yakni Rp1,13 triliun.

Di sisi lain, untuk pengadaan tanah tol lainnya yakni Pasir Koja-Soreang, pihaknya telah menyakurkan dana Rp40,97 miliar, atau 16,72% dari keseluruhan kebutuhan pengadaan tanah jalan tol sepanjang 15 km, senilai Rp244,90 miliar.

"Pada akhir tahun lalu, kami sudah membayarkan uang ganti rugi untuk berkas-berkas yang sudah ada, karena kan sempat terhenti," ujarnya

TRANS SUMATRA

Sementara itu, terkait dengan pembebasan tanah untuk Tol trans-Sumatra, pemerintah akan mengacu pada Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah.

Menurut Djoko Murjanto, pembebasan lahan akan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.

"Nantinya tinggal *sharing* saja. Tetapi porsi untuk pemda lebih kecil, sebagian besar pasti pusat," ujarnya.

Kebutuhan pembiayaan pembebasan lahan itu dipastikan besar mengingat panjangnya jalan tol mencapai 2.700 km. Oleh karena itu kebutuhan dana tersebut akan masuk dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.

"Dananya besar sekali, menca-

► BUMD menjanjikan pembebasan lahan selesai pada 2011, namun hingga akhir tahun lalu tidak ada perkembangan.

► BUMD hanya akan bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi III, IV, V, dan VI.

pai triliun. Ini merupakan sesuatu yang harus kami kerjakan dengan baik," kata Djoko.

Akan tetap, proses pembebasan lahan jalan tol trans-Sumatera ini tergantung dari kesiapan dari pemerintah, mulai dari pendanaan, perencanaan, dan perizinan.

Setelah perencanaan rampung, diserahkan ke gubernur dan akan ditindaklanjuti untuk proses ke publik. Kalau publik setuju, gubernur mengeluarkan surat persetujuan penetapan lokasi proyek (SP2LP).

Setelah itu, gubernur menyerahkan pembebasan lahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan ujung tombak pembebasan lahan sesuai UU No. 2/2012.

"Dari BPN sendiri harus sudah siap, kan UU baru menyebutkan semua *take the lead* adalah BPN. Tugas kami membayar pembebasan sesuai progres dari BPN," tutur Djoko. ■